

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PERCEPATAN PENGGUNAAN INTERNET DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO LUES**

SKRIPSI

Oleh :

**MAULANA SURYA ZIKRI
NPM : 1903100039**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : MAULANA SURYA ZIKRI

NPM : 1903100039

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZALS.Sos., M.Si (.....)

PENGUJI II : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A (.....)

PENGUJI III : AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

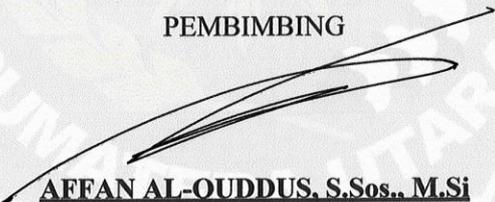
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : MAULANA SURYA ZIKRI
NPM : 1903100039
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Percepatan Penggunaan Internet di Lingkungan Pemerintahan Gayo Lues

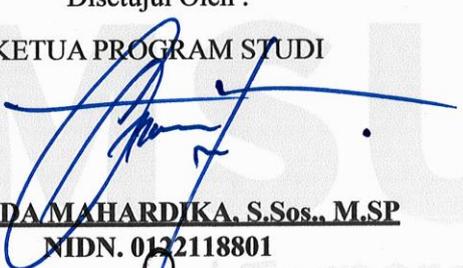
Medan, 26 Mei 2023

PEMBIMBING


AFFAN AL-OUDDUS, S.Sos., M.Si
NIDN. 0030017402

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 0122118801

DEKAN




DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya MAULANA SURYA ZIKRI, NPM 1903100039, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:
 1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
 2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 28 Mei 2023

Yang Menyatakan



MAULANA SURYA ZIKRI

1903100039

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERCEPATAN
PENGUNAAN INTERNET DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO
LUES**

**Maulana Surya Zikri
NPM 1903100039**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Pengelolaan Percepatan Penggunaan Internet di Lingkungan Pemerintahan kabupaten Gayo Lues pada tahun 2023 melalui Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominso) Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif atau metode yang menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada dilapangan dan tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi, hanya menguji kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues telah diimplementasikan walaupun masih menghadapi hambatan yang berasal dari kurangnya anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan keterbatasan SDM dan anggaran yang ada saat ini Diskominfo berusaha mencapai target pembangunan infrastruktur sebanyak 80% pada tahun 2023. Hingga saat ini, Masyarakat serta pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah merasakan hasil dari Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues meskipun implementasi belum rampung.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Teknologi Informasi, kebijakan Pengelolaan Percepatan Penggunaan Internet.

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of the Acceleration Management of Internet Usage policy in Gayo Lues district in 2023 through the Gayo Lues District Communication and Information Technology (Diskominfo). This research was carried out using a descriptive method with qualitative data processing or a method that describes situations and events in the field and does not explain relationships, does not test hypotheses or does not make predictions, only tests the truth based on the facts obtained. The data was obtained through interviews, field notes and documentation. The results show that the management policy for accelerating internet use within the Gayo Lues government has been implemented even though it still faces obstacles originating from a lack of budget and Human Resources (HR). With limited human resources and the existing budget, Diskominfo is trying to achieve the infrastructure development target of 80% by 2023. Currently, the people and government of Gayo Lues Regency have felt the results of the implementation of the policy to manage the acceleration of internet use within the Gayo Lues government, although implementation has not yet been fully implemented.

Keywords: Policy Implementation, Information Technology, Internet Usage Acceleration Management policy.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya secara terus menerus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi adalah **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERCEPATAN PENGGUNAAN INTERNET DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO LUES”** guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada yang tersayang kepada Ibunda saya Nova Khairani S.K.M dan ayah Mahdli Arami S.K.M untuk semua kepercayaan yang diberikan penuh kepada penulis, mendukung pertumbuhan dan Pendidikan penulis serta untuk segala doa yang terus mengalir di setiap Langkah penulis.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharshyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Affan Al-Quddus, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis menyusun skripsi.
8. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staff pengajar dan tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Said Idris Wintareza, SE, MM., selaku Kepala Dinas Diskominfo Gayo Lues yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan juga sekaligus sudah bersedia membantu sebagai informan untuk menyelesaikan penelitian.
10. Untuk sahabat penulis Mulyadi Abdulkam Putraga & Nurul Halisa., yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

11. Untuk Febriyanti Alda Lubis,S.AP selaku teman seperdopingan yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
12. Untuk teman seperjuangan Jepri Pernando, Mayang Sari, Saraya Fildzah, Rahmadsyah, Febri Yolanda, Sri Rezekina, Salma Indah Sari Srg, Khadijatul Ulfa, Yusril Azmi, Nanda Irfanuddin yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
13. Untuk adik-adik penulis Saidina Bintang Harasy,Fajar Hakkul Yakin, Fayyadh Ahmad Khalifi yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
14. Untuk teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik (HMJ IAP) FISIP UMSU periode 2021-2022.
15. Ucapan Terimakasih juga saya sampaikan kepada Teman-teman seperjuangan IAP 2019 yang sudah bersama-sama melewati proses belajar dengan penulis.

Terimakasih juga untuk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah bekerja sama dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat kiranya memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 25 Juli 2023
Penulis

Maulana Surya Zikri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Implementasi.....	8
B. Kebijakan Publik.....	10
C. Implementasi Kebijakan Publik.....	12
D. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	20
E. Pengelolaan.....	28
F. Percepatan.....	29
G. Evaluasi Implementasi Kebijakan.....	30
H. Penggunaan dan Internet.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Kerangka Konsep.....	37

C. Kategorisasi Penelitian.....	39
D. Informan atau Narasumber.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisi Data	42
G. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
H. Sistematika Penulisan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
1. Latar Belakang Objek	45
2. Penyajian dan Analisis	49
3. Pembahasan Temuan.....	55
BAB V PENUTUP.....	66
1. Simpulan	66
2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memperlancar segala aktivitasnya. Saat ini, komunikasi jarak jauh merupakan kebutuhan masyarakat (Irmalianti, 2016). Perkembangan teknologi telekomunikasi sudah menjadi sarana yang tak terpisahkan dari pola kehidupan manusia. Hal ini mendorong teknologi telekomunikasi untuk terus berkembang untuk terus memberikan kemudahan bagi manusia untuk dapat berkomunikasi dimana pun mereka berada.

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkat dengan cepat, terutama dalam hal jaringan komputer, handphone, gadget dan alat komunikasi lainnya. Kemajuan Teknologi informasi dan Komunikasi telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Sekat-sekat informasi dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya.

Pengembangannya dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah

dan menghemat waktu.

Semakin derasnya arus globalisasi dan semakin pesatnya perkembangannya yang dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh.

Skenario global tentang pembangunan teknologi komunikasi dan informasi juga merumuskan perkembangan ekonomi dan perubahan sosial di negara-negara dunia semakin bertambah dengan kemajuan komputer dan teknologi ICT pada abad 21 ini (Selwyn 2004). Bahkan beberapa ahli mengemukakan argumen bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan dampak terhadap perubahan yang disebut oleh Castell sebagai ‘knowledge economy’ dan ‘network societies’ (Castell 1996, 1997, 1998, Reich 1991). Kemampuan penggunaan teknologi komunikasi dan informatika dianggap penting bagi era “modernisasi”. Konsepsi “modernisasi” sendiri diukur dengan kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pembangunan teknologi komunikasi dalam proses industrialisasi diarahkan untuk kemajuan warga negaranya. Pemerintah berkeinginan membawa warga negaranya agar tidak tertinggal atau “left behind” dan bisa memenangkan atau “winning” era globalisasi yang terjadi (Selwyn 2004).

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat memang dianggap akan memberikan perubahan-perubahan mendasar, terutama

peningkatan kualitas kehidupan. Kedatangan TIK dapat dianggap sebagai “individual empowering” atau pemberdayaan bagi individual (D’Allesandro & Dosa 2001). Pembangunan TIK juga meningkatkan level interaksi sosial dan keterlibatan masyarakat sipil (Katz et al. 2001). Keinginan mewujudkan masyarakat modern yang tidak tertinggal dengan kondisi globalisasi, mendorong pemerintah untuk berupaya memajukan kualitas kehidupan warga negaranya melalui program-program pembangunan teknologi informasi hingga ke pelosok desa. Tujuannya adalah selain memberikan akses murah terhadap TIK juga mengenalkan penggunaan TIK untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pelosok pedesaan.

Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Agar tidak dikatakan sebagai masyarakat yang buta akan informasi. Internet (interconnectionnetworking) menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.

Apalagi saat ini manusia dihadapkan pada era globalisasi yang merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi (internet). Internet sebagai media informasi dan komunikasi merupakan suatu kelebihan dibandingkan dengan media lain. Informasi yang didapatkan di internet lebih mudah, cepat dan murah dengan jangkauan global. Bahkan internet juga dapat disebut sebagai suatu perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran informasi

dalam berbagai bentuk. Selain itu, internet juga dikenal sebagai dunia maya, karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti olah raga, politik, pendidikan, hiburan dan lain sebagainya

Melalui sarana internet diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dalam pencarian segala informasi yang dibutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aplikasi-aplikasi internet yang dapat bermanfaat di segala bidang pembangunan. Sarana jaringan telekomunikasi dan informasi di daerah adalah bangunan tower mini yaitu Base Transceiver Station (BTS).

Base Transceiver Station atau (BTS) adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah dan sejenis gawai lainnya, kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Jadi BTS merupakan sebuah rangkaian yang memiliki peran untuk membantu masyarakat dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya yang terpisah oleh jarak dan waktu. Instalasi BTS biasanya dilakukan pada sebuah *tower*, menara dan bangunan tinggi lainnya, agar sinyal yang dipancarkan dapat menjangkau area yang luas. Base Transceiver Station (BTS) merupakan bagian dari Base Station Subsystem untuk sistem manajemen.

Base Transceiver Station (BTS) dibangun berdasarkan usul pemerintah daerah melalui kerjasama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Pemerintah Daerah, perusahaan penyediaan transmisi, power

dan tower serta operator selular.

Daerah Kabupaten Gayo Lues selain memiliki 77 wilayah *blankspot*, Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah strategis dengan berbagai potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Adapun beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Gayo Lues adalah bidang pertanian, industri, perkebunan dan pariwisata. Namun, potensi pada bidang-bidang tersebut belum dikembangkan dengan baik. Padahal melalui pengembangan bidang-bidang tersebut dapat membangun perekonomian.

Oleh karena itu, dengan adanya penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika diharapkan mampu untuk menghidupkan potensi pada bidang-bidang tersebut dengan maksimal. Selain itu melalui pembukaan akses informasi masyarakat perbatasan, pemanfaatan penyediaan jaringan telekomunikasi dan informasi adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Akses Informasi Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues adalah melalui Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS). Adapun pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dilakukan pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil). Selain itu, berdasarkan Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa dalam pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) terfokus pada wilayah yang belum memiliki sinyal atau *blankspot area* serta belum memiliki sarana telekomunikasi dan informasi di wilayahnya.

Base Transceiver Station (BTS) memberikan dampak positif terhadap perkembangan informasi dan komunikasi masyarakat. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) memberikan kemudahan berkomunikasi dan

memperoleh komunikasi. *Base Transceiver Station* (BTS) juga mempermudah dalam berkomunikasi, membantu segala urusan menjadi lebih cepat jika dibanding tidak adanya *Base Transceiver Station* (BTS) yang akan sulit untuk berkomunikasi.

Ketersediaan jaringan internet, telekomunikasi dan informasi pada suatu wilayah merupakan hal penting terutama dalam hal pembangunan dan juga akses suatu pemerintahan maupun perkantoran. Pembukaan akses internet memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat berkembang dan terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi di luar.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Percepatan Penggunaan Internet di Lingkungan Pemerintahan Gayo Lues.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini **Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Percepatan Penggunaan Internet di Lingkungan Pemerintahan Gayo Lues.**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Percepatan Penggunaan Internet di Lingkungan Pemerintahan Gayo Lues.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah setempat maupun lembaga-lembaga terkait yang membutuhkan.
- c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

BAB II URAIAN TEORITIS

A. Implementasi

Menurut (Oktasari, 2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Kemudian menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengemukakan "Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "implementation", berasal dari kata kerja "to implement", kata *to implement* berasal dari bahasa latin "implementatum" dari asal kata "impere" dimaksudkan "to fill up", "to fill in" yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "plere" maksudnya "to fill", yaitu mengisi. Selanjutnya kata "to implement" dimaksudkan sebagai:

(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish.

(2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling, to give practical effect to.

(3) to provide or equip with implement.

Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil

yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Menurut (Mulyadi, 2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan- keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Sedangkan menurut (Tahir, 2014:55) “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”Kemudian menurut (Sutojo, 2015:4) mengatakan bahwa, “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”.

Menurut (Siagian, 2016:290) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan.

B. Kebijakan Publik

Secara umum, istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkaitan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan berdasarkan alasan-alasan tertentu sehingga tak ada masalah bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian.

Anderson (Ekowati, 2005:5) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson, ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah yang berkuasa.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu

masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Thomas R. Dye (dalam Suwitri 2008:8), mengemukakan kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

David Easton (dalam Suwitri 2008:9) mengemukakan kebijakan publik “adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa(sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Kemudian menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (dalam Suwitri 2008:9) Kebijakan publik adalah “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.”

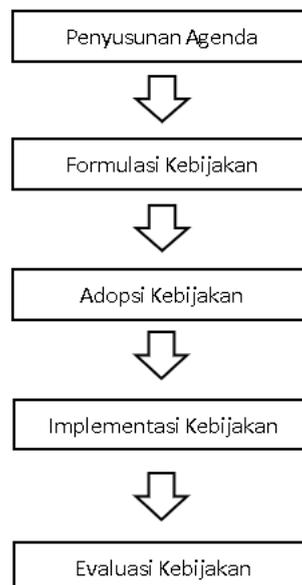
Pressman dan Widavsky dalam Budi Winarno (2002:17) menyimpulkan kebijakan publik merupakan hipotesis yang mengandung kondisi awal dan akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Tachjan (2006: 25) juga mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan

ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif- alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwasannya kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah atau pihak lain yang lebih dikenal dengan sebutan aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing.

Proses pembuatan kebijakan publik dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan untuk memudahkan menganalisis kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik dikelompokkan oleh Dunn (2000), sebagai berikut:



C. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan

publik. Praktek implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Oleh karena itu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Untuk melihat keberhasilan suatu program, maka akan sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan Cleaves (Waluyo, 2007:49) berpendapat bahwa “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps)”.

Udoji (Mulyadi, 2015:46) juga berpendapat bahwa, “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan- kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rap Hamdi (2014:97) berpendapat, “pelaksanaan atau

implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”.idalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”.

Tachjan (Tahir, 2014:53) berpendapat bahwa: “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan
 - a. Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
 - b. Kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
 - c. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
 - d. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangankekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan

untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 : 149-153).

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum

(secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya
- Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).



Dari skema di atas terlihat bahwa proses implementasi kebijakan dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi kebijakan yang segera atau disebut sebagai “policy performance”. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan is barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut sebagai “policy outcome” atau “policy

impact”. Dengan demikian di dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan di samping “policy performance” yang diperoleh.

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy (1997 : 102- 106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Solichin Abdul Wahab, 1991 : 36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I :

Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- b. Menentukan standar pelaksanaan
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II :

Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode

Tahap III :

Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implelementasi kebijakan negara.

Selain itu, konsep pelaksanaan kebijakan di Indonesia berlandaskan good governance. Untuk mencapai good governance tersebut perlu diketahui dimensi pencapaian yaitu (Hardiansyah, 2018):

1. Konsistensi.

Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pelaksanaannya dilakukan

secara konsisten yang sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku

2. Transparansi.

Transparansi ada jika terdapat kebebasan akses yang dapat dilakukan oleh publik atau kelompok yang memiliki kepentingan . Transparansi informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, mudah dimengerti, dan tersedia secara memadai;

3. Akuntabilitas.

Pelaksanaan sebuah kebijakan harus dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Keadilan. Keadilan dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa tidak membedakan pelayanan terhadap golongan tertentu (tidak besikap deskriminatif);

5. Partisipatif.

Partisipatif artinya bawah masyarakat berperan dalam keterlibatannya pada pelaksanaan kebijakan. Selain sebagai penopang pelaksanaan kebijakan, masyarakat juga berperan sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap wawenang pelaksana kebijakan;

6. Efektivitas.

Efektivitas berhubungan dengan ketercapaian hasil kebijakan berdasarkan tindakan dan aspek rasionalitas tindakan yang berhubungan dengan layanan atau produk. Sebuah pelaksana kebijakan dikatakan efektif apabila tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

7. Efisiensi.

Efisiensi berhubungan dengan kuantitas pemaksimalan sumber daya seperti pencapaian tujuan, penggunaan manusia, biaya, waktu dan peralatan lainnya.

Efisiensi akan berdampak kepada efektivitas pelaksanaan kebijakan

Nirwandar juga menjelaskan dalam penataan kelembagaan/organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip organisasi modern agar proses implementasi kebijakan berjalan dengan baik:

1. Visi dan misi yang jelas; hal ini akan sangat membantu disusunnya organisasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan terutama mengantisipasi tuntutan perubahan dimasa yang akan datang.
2. Organisasi flat atau datar; jenjang organisasi dibatasi, sehingga organisasi lebih flatting. Hal ini berarti tingkatan/eselon dikurangi atau lebih jelasnya organisasi pemerintah cukup memiliki dua atau tiga tingkatan struktural di bawah puncak pimpinan.
3. Organisasi ramping (tidak banyak pembedangan); merujuk pada format organisasi pemerintah di masa yang akan datang, maka organisasi yang ramping dengan jumlah pembedangan yang dibatasi merupakan suatu keharusan. Organisasi pemerintah yang benar-benar diperlukan dapat dikembangkan, sebaliknya lembaga yang dianggap menambah jenjang pengambilan keputusan dihapuskan artinya penataan organisasi pemerintah daerah sesuai kebutuhan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan yang memiliki beberapa tahapan dengan tetap memperhatikan pada organisasi pemerintah atau swasta kebijakan tersebut diimplementasikan.

D. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Grindle (dalam Wibawa, 1990:127) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan,
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan,
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan,
- 5) Siapa pelaksana program,
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Dan Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57- 58), implementasi kebijakan publik sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin memengaruhinya. Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislative kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut

tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa Implementasi kebijakan publik menyangkut tiga hal, yaitu :

- (1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
- (2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan
- (3) Adanya hasil kegiatan.

Menurut Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983:61) Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud diantaranya:

- a. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah.
- b. Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.
- c. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenaan dengan indikator, kondisi sosioekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta

komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana

- d. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005:90) membuat kategorisasi bahwa proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di lapangan sebagai implementor dan aktor individu selaku kelompok target. Kepatuhan pelaksana diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksana dengan kewajiban yang dilaksanakan.

George C. Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor :

- (1) Komunikasi,

Edward III dalam Winarno mengemukakan faktor komunikasi mempunyai tiga dimensi yaitu dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana kebijakan (implementers), tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut.

Para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

(2) Sumber daya,

Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga pihak-pihak tersebut mengetahui maksud, tujuan, sasaran dan substansi dari kebijakan publik. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami tetapi juga harus jelas. Jika tidak jelas, para pelaksana kebijakan tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Edwards mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu:

1. kompleksitas kebijakan publik,
2. keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat,
3. kurangnya consensus terhadap tujuan kebijakan,
4. masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru,
5. menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan
6. sifat pembuatan kebijakan pengadilan. Ketidakjelasan pesan komunikasi tidak selalu menghalangi implementasi karena pada tataran tertentu para pelaksana dapat bersifat fleksibel dalam melaksanakan kebijakan.

Dimensi ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah yang saling bertentangan akan menyulitkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan tersebut mempunyai unsur kejelasan. Perintah-perintah pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten juga akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

(3) Disposisi

Edward III memandang disposisi sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementers) untuk melaksanakan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam praktiknya hal ini seperti karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

(4) Sumber Daya

Meski perintah-perintah implementasi disampaikan secara akurat, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, implementasi tidak akan efektif. Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya meliputi staf dengan jumlah memadai dan keahlian yang tepat untuk menjalankan tugas mereka, serta informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi pelayanan publik yang berfungsi.

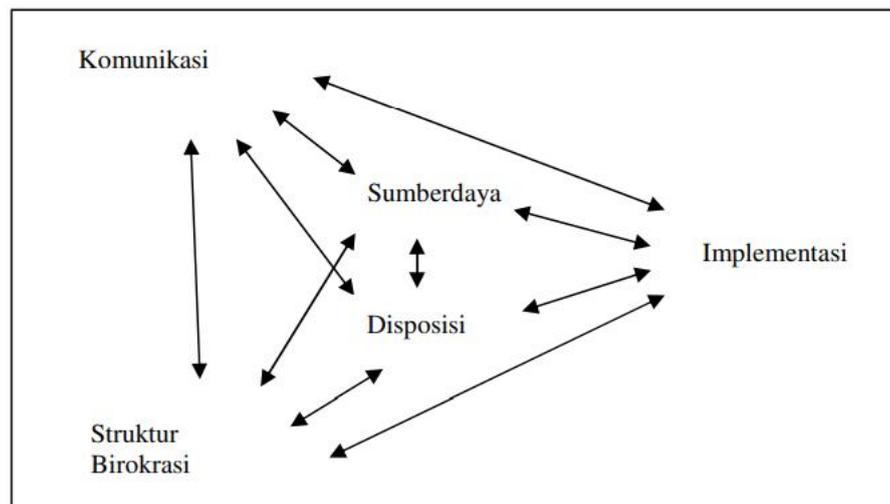
(5) Struktur birokrasi.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan cukup dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan dapat jadi masih belum efektif, karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi (Edward III, 1980:11). Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan luar organisasinya

Birokrasi besar sekali perannya dalam tahap implementasi ini, sehingga terdapat pula kendala-kendala dari para implementor itu. Kendala dalam implementasi kebijakan yang dinamakan oleh Dunsire (1978 : 87) sebagai implementation gap yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan

(direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Perbedaan tersebut tergantung dari implementation capacity dari organisasi/aktor atau kelompok/organisasi yang dipercaya mengembang tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.



Menurut Winarno (2005:150), "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan

prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungandiantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Tangkilisan (2003:12) menyatakan bahwa komunikasi merupakan hal penting dalam Implementasi suatu Kebijakan komunikasi memegang peranan penting terutama dalam pelaksanaan Kebijakan tersebut, agar Implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengImplementasikan suatu Kebijakan harus tau apa yang mereka kerjakan. Keputusan Kebijakan dan peraturan Implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator.

E. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan

ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahamisebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

F. Percepatan

Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Percepatan dibagi menjadi percepatan diperlambat dan percepatan dipercepat. Percepatan diperlambat artinya arah percepatannya berlawanan dengan arah kecepatan. Sedangkan percepatan dipercepat artinya arah percepatannya searah dengan kecepatan. Percepatan bernilai negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu (diperlambat). Percepatan bernilai positif ketika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu (dipercepat).

G. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik melibatkan berbagai stakeholder secara partisipatif dan demokratis. Pembuat kebijakan dan stakeholder secara kolaboratif terlibat dalam proses analisis dan pelaksanaan kebijakan. Maka diperlukan evaluasi sebagai bentuk penilaian akuntabilitas dan kinerja dari kebijakan publik yang dilaksanakan. Ada tiga tahapan bentuk evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yaitu:

1. Evaluasi pada tahapan perencanaan

Evaluasi pada tahapan perencanaan ini disebut juga dengan *ex-ante* yang artinya bahwa kebijakan dilaksanakan dengan maksud memilih alternatif prioritas dari berbagai alternatif yang telah dirumuskan (Kawengian and Rares, 2015). Tujuan evaluasi tahapan ini adalah untuk menghindari penilaian awal yang diberikan kepada kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu juga sebagai pemberi informasi terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Evaluasi pada tahapan pelaksanaan ini disebut juga dengan *on-going*. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan kemajuan pelaksanaan yang dibandingkan dari proses awal kegiatan (Prastisha and Triharjanto, 2020). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Apabila ada kesalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan evaluasi maka akan segera diatasi melalui penilaian *ongoing* ini melalui proses rekomendasi. Selain itu evaluasi *on going* juga dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan

proses pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Evaluasi pada tahapan ini disebut juga dengan *ex-post*. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan (Budiani and Suliyati, 2016). Selain itu tahapan ini juga bertujuan untuk menganalisis tingkat ketercapaian luaran kebijakan. Selain itu pada tahapan ini juga dapat diketahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan. Ketiga tahapan evaluasi ini harus dilaksanakan pada proses pelaksanaan kebijakan agar dapat menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Proses penilaian kebijakan yang dilakukan di Indonesia menggunakan gabungan dari ketiga bentuk penilaian. Hal ini dikarenakan objek kebijakan yang luas dan sumber daya yang variatif harus dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut harus tepat sasaran dalam memecahkan permasalahan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

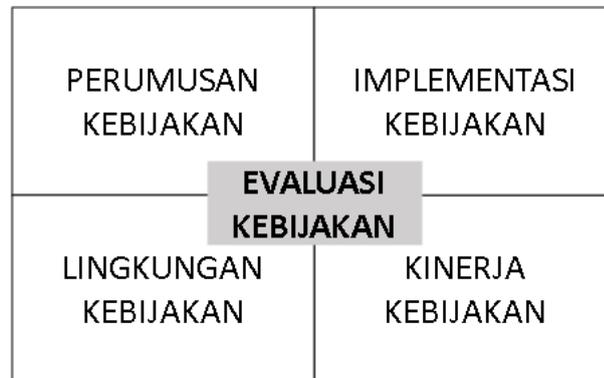
Evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. Suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*specification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi. Menurut William N. Dunn (1999), istilah evaluasi dapat disamakan

dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan, dan atau evaluasi sumatif.

James P. Lester dan Joseph Steward, Jr (2000) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Pemahaman tentang evaluasi kebijakan biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja atau hasil kebijakan.



Menurut Sofian Effendi, tujuan evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

- a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan yang memengaruhi variasi outcome implementasi kebijakan.
- c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variable-variabel yang bersifat natural atau variabel yang tidak bisa diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Kegiatan evaluasi adalah langkah menilai suatu kebijakan yang telah

dilaksanakan. Menurut M. Irfan Islamy, penilaian kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi penilaian kebijakan dapat dilakukan pada fase perumusan masalahnya; formulasi usulan kebijakan, implementasi, legitimasi kebijakan. Dalam penelitian ini kegiatan evaluasi diarahkan dan dibatasi pada implementasi kebijakan Badan Informasi Publik dalam usaha menyebarkan informasi publik yang dikaitkan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan informasi.

H. Penggunaan dan Internet

a. Penggunaan

Penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang.

b. Internet

Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.

Secara sederhana menurut Hartono, Jogiyanto (2009:1). Internet dapat diartikan kumpulan dari beberapa computer. Bahkan jutaan computer di seluruh dunia yang saling berhubungan atau terkoneksi satu sama lainnya. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel atau serat optic, satelit atau melalui sambungan telepon. Pendapat ini mengartikan bahwa internet merupakan media komunikasi dan informasi modern yang dapat dimanfaatkan secara global oleh pengguna diseluruh dunia dalam interkoneksi antar jaringan computer yang terbentuk melalui sarana berupa penyedia akses (provider) internet, sehingga internet sebagai media

informasi dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran dan penyebaran informasi tanpa terhalang oleh jarak, perbedaan waktu dan juga factor geografis bagi seseorang yang ingin mengakses informasi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomenal yang terjadi dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Metode Deskriptif Kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada dilapangan. Penelitian dengan jenis ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi, hanya menguji kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

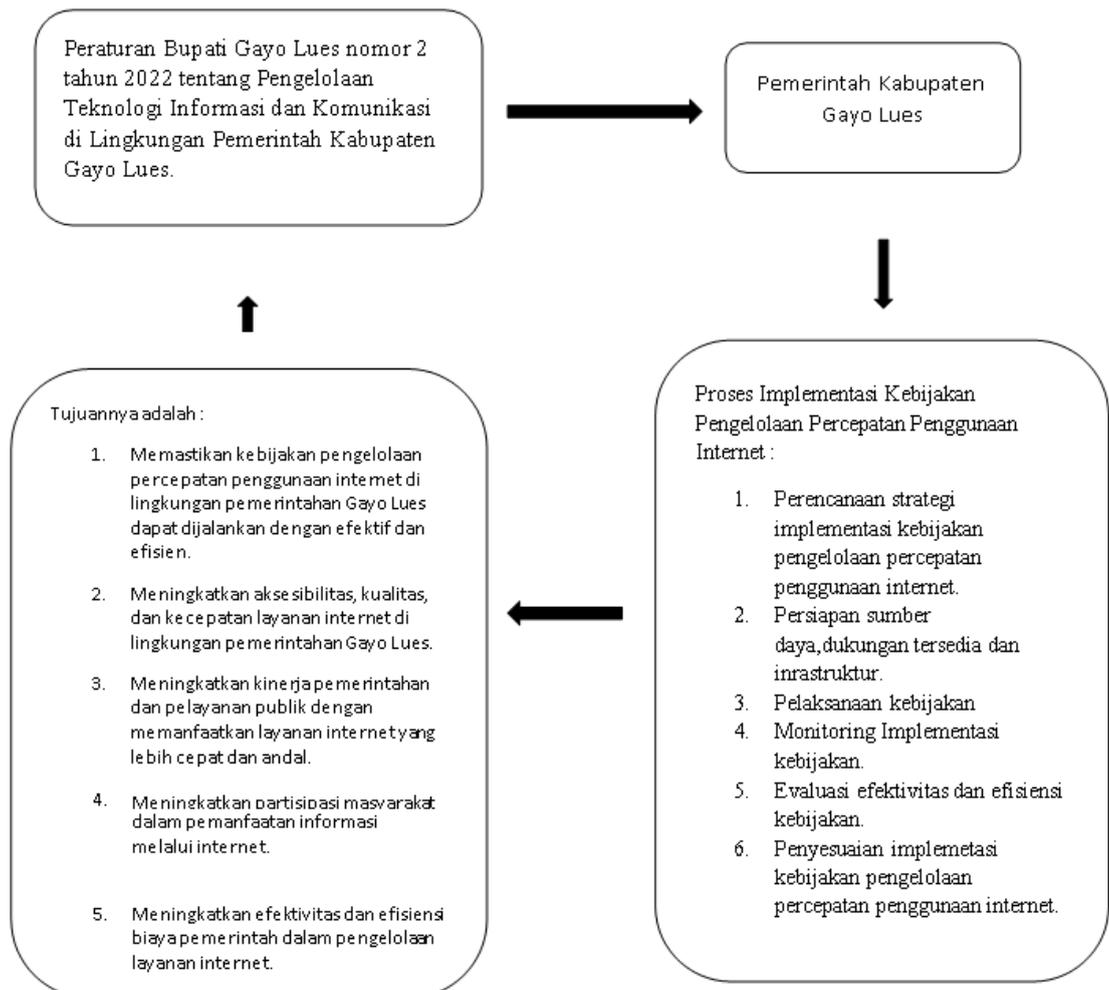
Metode penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2016:53) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.

Menurut (Arikunto, 2018:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Menurut (Narbuko, 2009:44) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya

B. Kerangka Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah



dimaksud kedalam variabel agar lebih terarah. Definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan. Pada tahap ini

suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan dan lebih banyaknya keberhasilan dari suatu kebijakan akan sangat terlihat pada tahap implementasi ini.

2. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah atau pihak lain yang lebih dikenal dengan sebutan aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing.
3. Implementasi kebijakan publik adalah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan.
4. Pengelolaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sumber daya atau aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, pengelolaan mencakup pengaturan dan pengawasan berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam keseluruhan, pengelolaan adalah suatu proses yang terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan melibatkan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian berbagai aspek aktivitas atau sumber daya tertentu.
5. Percepatan adalah proses peningkatan kecepatan atau laju suatu peristiwa atau proses tertentu. Dalam teknologi, percepatan mengacu pada pengembangan atau peningkatan kecepatan sistem atau layanan tertentu, seperti internet, komputer, atau transportasi.
6. Penggunaan adalah tindakan atau proses memanfaatkan suatu barang, layanan, atau sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks teknologi informasi, penggunaan mengacu pada tindakan atau proses memanfaatkan berbagai layanan atau aplikasi digital untuk keperluan tertentu,

seperti penelitian, belajar, atau hiburan.

7. Internet adalah jaringan komunikasi global yang terdiri dari berbagai perangkat dan infrastruktur komunikasi yang saling terhubung. Internet memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui berbagai teknologi, seperti komputer, telepon seluler, tablet, dan perangkat lainnya.

C. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari penelitian tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,
4. Sumber daya yang dikerahkan.

Mary B. Austin dan Patricia A. Rankin (2016:14) “kategori penelitian membantu peneliti dalam memilih metode penelitian yang paling sesuai untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian. Dalam bukunya yang berjudul "Designing and Conducting Research in Education", mereka juga menekankan pentingnya peneliti untuk memahami perbedaan antara jenis penelitian, seperti penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal-komparatif, dan penelitian eksperimen.”

William Wiersma (2009:36), Menurutnya, kategori penelitian membantu

peneliti dalam memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam bukunya yang berjudul "Research Methods in Education", ia juga menekankan pentingnya memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner.

Donald Kerlinger (1973:11) kategori penelitian membantu peneliti dalam merencanakan dan melakukan penelitian dengan baik. Dalam bukunya yang berjudul "Foundations of Behavioral Research", ia juga menekankan bahwa memilih jenis penelitian yang tepat dapat membantu meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

D. Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian menggunakan individu sebagai pemberi informasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Diskominfo Gayo Lues
2. Masyarakat Gayo Lues
3. Tokoh Masyarakat Gayo Lues

Untuk memudahkan, para narasumber/informan diberikan kode:

1. Kepala Diskominfo Gayo Lues sebagai Narasumber 1
2. Masyarakat Gayo Lues sebagai Narasumber 2
3. Tokoh Masyarakat Gayo Lues sebagai Narasumber 3

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian.

Sumber data ini didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan dalam penelitian, yaitu mencakup :

a. Data Primer

Data Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

Sugiyono (2018:456) berpendapat bahwa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

b. Data Skunder

Yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang

diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

Teknik pengumpulan data skunder juga berupa dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian sebagai sumber kedua atau sumber sekunder untuk mendukung data primer. Pada penelitian kali ini, peneliti mengumpulkan data sekunder dengan teknik dokumentasi .

Teknik ini diperoleh menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dalam lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian.

Sugiyono (2018:456) berpendapat bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh

karena itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data Data yang disusun dari hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategorisasi dan sejenisnya. Dari penyajian data ini peneliti diharapkan mampu memahami yang terjadi sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang ketiga, (Iskandar, 2010) menjelaskan bahwa penarikan simpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa penarikan simpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali. Peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

G. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominso), Kabupaten Gayo Lues.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat mengkaji penelitian secara teratur dan sistematis, maka sistematika yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengembangan dan Desa Wisata.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara informan atau narasumber.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah simpulan dan saran.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Objek

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gayo Lues berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues dan Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayo Lues. dengan struktur organisasi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Said Idris Wintareza. SE.MM	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian
2	Marhaban, ST	Sekretaris
3	Abdiansyah.SST	Kabid. Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik
4	Khalidin.SE	Kabid. Persandian Dan Statistik
5	Arwinsyah.SH	Kabid.Tata Kelola (E-Goverment) Dan Komunikasi
6	Win Ardi.SE	Kassubag.Umum Dan Kepegawaian
7	Rislah Afni.SST	Kassubag. Program ,Keuangan Dan Aset

8	Fery Afizal Syami.S.KEP	Kasi. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
9	Purna Chandra.SE.MM	Kasi Tata Kelola Persandian
10	Sri Pinah.SE	Kasi. Pelayanan Informasi Publik
11	Nurizarahmi.SE	Kasi. Pemberdayaan Dan Kemitraan
12	Suryadi.SP	Kasi. Statistik
13	Alimuddin.A.Md	Kasiinfrastruktur Dan Teknologi Komunikasi
14	Krisna.Skom	Kasi.Pengembangan Aplikasi E-Goverment
15	Jemaan.SST	Pengurus Barang
16	Julfam Effendi.SE	Pelaksana
17	Hadi Mulya.S.ST	Pelaksana
18	Ismail Almortada.Skom	Pelaksana
19	Sartika	Pelaksana
20	Iwan Fachrozi	Pelaksana

Diskominfo Gayo Lues dengan misi:

1. Sektor Pengelolaan, Pelayanan Informatika dan Komunikasi Publik:

Membangun Jaringan Informatika dan Mengintegritasikan data kelompok – kelompok Informasi Masyarakat Sebagai Penggerak Forum Dialogis dalam Memecahkan Persoalan-persoalan yang dihadapi Masyarakat.

2. Sektor Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government),

Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi:

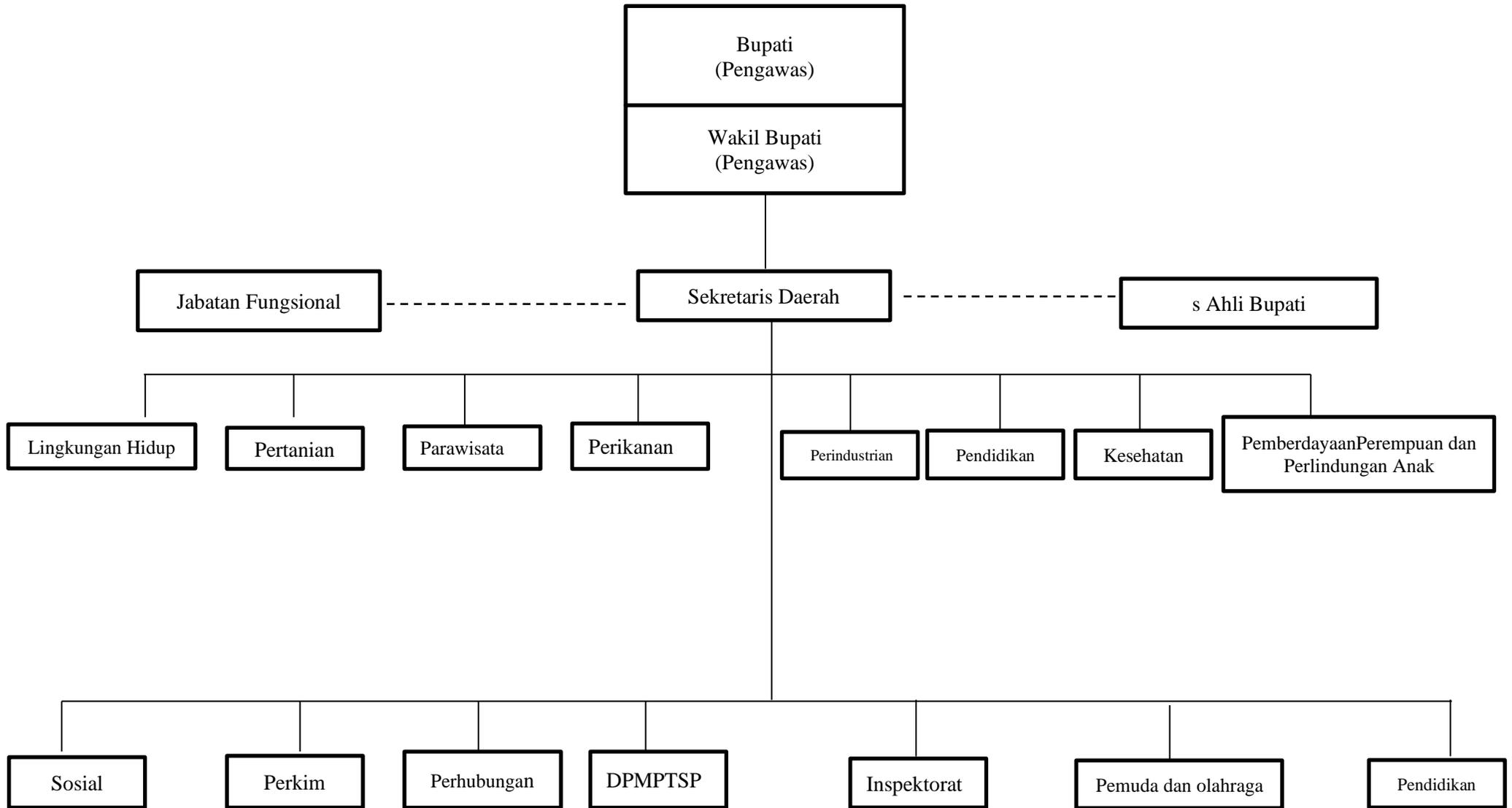
Membangun dan Mengembangkan TIK Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Layanan Informasi Publik secara Transparan dan Akuntabel.

3. Sektor Persandian:

Membangun dan Menembangkan SDM Aparatur Pemerintah Khususnya di Bidang Persandian dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi guna memberikan Layanan Informasi Publik yang Sehat dan aman. Membangun Fasilitas dan perangkat Persandian untuk mendukung Operasional pelaksanaan Persandian di sektor pemerintahan.

Memiliki rencana strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagaimana yang tercantum dalam visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayo Lues yaitu “Terwujudnya Komunikasi, Informatika yang aman, Ramah, Sopan, Santun, Beretika dan Rahasia”.

Sebagai perangkat daerah, Diskominfo dalam hubungannya kepala daerah tingkat kabupaten (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) adalah sebagai berikut:



Catatan:
 Semua nama pada kolom yang berhubungan langsung dengan Sekretaris Daerah, dimulai dengan Dinas. Pengecualian untuk Bupati, Wakil Bupati dan Inspektorat

Diskominfo sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, bertugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sementara Bupati dan wakil Bupati bertugas sebagai pengawas Diskominfo.

2. Penyajian dan Analisis

Setelah mengalami proses perolehan data dengan metode yang digunakan, selanjutnya data tersebut akan dianalisis, dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat. Secara berurutan akan disajikan data-data yang akan mengacu kepada kategorisasi penelitian. Data yang akan digali tentang Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues.

Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues sangat dipengaruhi oleh kepentingan karena saat ini layanan pemerintah menggunakan aplikasi sehingga pemerintah dan masyarakat membutuhkan internet.

Sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Karena kegiatan pelayanan pemerintah, baik layanan kepada pemerintah pusat maupun masyarakat itu menggunakan jaringan internet, karena layanan pemerintahan menggunakan aplikasi.

Implementasi ini dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah dan masyarakat dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Karena antara masyarakat dan pemerintah sama membutuhkannya. Kepentingan masyarakat dan pemerintah mendorong implementasi ini. Dan tentunya Pengelolaan penyelenggaraan

pemerintah semua harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan regulasi

Pastinya didorong dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah dan hal ini juga engga salah selama sesuai dengan aturan yang ada.

Namun, Diskominfo Gayo Lues tidak memiliki cara khusus untuk mengidentifikasi kebijakan mana yang dipengaruhi kepentingan karena pada dasarnya setiap kebijakan pasti dipengaruhi kepentingan.

Kita tidak memiliki cara khusus untuk mengidentifikasi kebijakan mana yang dipengaruhi kepentingan karena pada dasarnya semua kebijakan pasti dipengaruhi kepentingan.

Implementasi kebijakan ini menjadikan layanan pemerintahan menjadi semakin cepat sehingga lebih efektif dan efisien. Hal ini jelas karena didukung oleh internet yang semakin berkualitas.

Manfaat dari implementasi ini adalah layanan pemerintahan menjadi semakin cepat sehingga lebih efisien dan efektif dan hal ini pastinya harus didukung oleh internet yang semakin cepat.

Di era yang modern ini, sudah minim daerah-daerah yang tidak memiliki internet. Namun, hal ini masih terjadi di Kabupaten Gayo Lues. Masih banyak tempat yang belum bisa mengakses internet karena minimnya infrastruktur. Namun dengan adanya implementasi kebijakan ini, semakin banyak dan mudah untuk mengakses internet. Pertanyaan yang sama di lontarkan kepada narasumber/informan ke-2.

Sekarang berurusan jadi lebih mudah. Dulu kalo ada keperluan yang butuh internet urusannya bisa sehari-hari karena terkendala internet. Sekarang di rumah saya sudah bisa internet kalo ada urusan dengan kantor pemerintah dan perlu internet juga ga perlu sehari-hari atau bolak balik karena kebetulan rumah saya jauh dari kota. Jadi kalo ada urusan ke kantor pemerintah susah kali dulu.

Selain pemerintah, masyarakat juga semakin dimudahkan dengan implementasi kebijakan ini. Saat ini, seluruh masyarakat membutuhkan internet baik untuk berurusan di kantor pemerintah maupun urusan pribadi. Pertanyaan yang sama juga kita lontarkan pada narasumber/informan ke-3.

Kalo di tempat tinggal saya kan memang ada sinyal dari dulu cuma dulu saya rasa sering ada gangguan. Kadang-kadang tidak ada sinyal bisa setengah hari. Apalagi dulu ketika covid dan anak-anak sekolah online. Kasian kadang ga bisa sama sekali ngikutin kelas. Awal-awal teman sekelasnya ga percaya masih ada tempat yang ga ada sinyal di zaman modern ini karena kebetulan dia sekolah di luar kota dan akhirnya setelah dijelaskan dan terjadi beberapa kali, teman sekolah beserta guru-gurunya jadi mengerti. Tapi saya rasa sekarang sinyalnya sudah tidak selelet dulu lagi dan sudah jarang sinyal putus sampe setengah hari. Sekarang mau berurusan yang pake internet baik dari rumah maupun di kantor sudah semakin mudah.

Diskominfo Gayo Lues mengukur dan menilai manfaat-manfaat dari

implementasi ini dengan cara melihat kualitas terkini pelayanannya. Dan hal ini terbukti, dengan pelayanan pemerintah yang semakin optimal, maksimal dan lebih cepat. Dengan adanya implementasi ini internet semakin cepat dan berkualitas sehingga lebih efektif dan efisien, Layanan pemerintah semakin baik dan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat.

Tentu saja memberi nilai tambah. Sekarang pelayanannya lebih cepat. Jadi otomatis semakin efektif dan efisien baik bagi internal pemerintah dan masyarakat. Kalo sebelumnya orang bisa bolak-balik kesini untuk urusan yang sama sampe beberapa kali, sekarang ga perlu bolak-balik karena internet semakin stabil. Untuk urusan-urusan yang sebelumnya harus masyarakat lakukan ke kantor kita, sekarang mereka bisa melakukannya bahkan sendiri dari rumah.

Saat ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai derajat perubahan yang diinginkan. Salah satunya adalah terus memperbaiki dan menambah infrastruktur yang telah ada agar bisa mencapai seluruh organisasi pemerintah.

Upaya-upaya terus dilakukan dengan membangun infrastruktur internet hingga ke seluruh organisasi pemerintah daerah se-kabupaten Gayo Lues.

Setiap organisasi pasti memiliki harapan atau target baik jangka Panjang maupun jangka pendek. Diskominfo Gayo Lues saat ini memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2023, yaitu pembangunan infrastruktur telah mencapai 80%.

Saat ini kita berharap pembangunan infrastruktur telah mencapai 80% pada tahun 2023 ini.

Selain pemerintah, masyarakat tentu memiliki harapan yang besar dari implementasi kebijakan ini. Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Narasumber ke-2 dan ke-3.

Saya berharap semoga sinyal internet disini semakin stabil dan desa-desa yang belum ada internet juga segera punya.

Semoga dikelola dengan baik, tepat serta cepat. Karena kan sekarang apa-apa kita butuh internet.

Selain target, setiap organisasi pasti memiliki hambatan yang harus dihadapinya termasuk Diskominfo Gayo Lues. Saat ini hambatan yang sedang dihadapi berasal dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran untuk mencapai fokus utama mereka dalam implementasi kebijakan ini.

Fokus utama kita saat ini kan pembangunan infrastruktur (Intra pemerintah). Kita memiliki hambatan dari segi SDM dan anggaran.

Terlepas dari kendala SDM, Diskominfo memanfaatkan SDM yang tersedia dengan sebaik mungkin dan tetap fokus mencapai target tahun ini.

Saat ini kita mengusahakan yang terbaik dengan SDM yang ada tanpa mengalihkan fokus pada target yang harus kita capai pada tahun ini. Ketika ada gangguan kita langsung mengirimkan teknisi turun ke lapangan.

Kebijakan ini akan berhasil diimplementasikan dengan baik jika Diskominfo memiliki SDM yang unggul, anggaran yang cukup dan pengimplementasian dilakukan secara efisien.

SDM yang baik, anggaran yang cukup, pemanfaatan sebagaimana mestinya yang mendukung pelayanan pemerintah.

Evaluasi dari implementasi kebijakan tidak harus dilaksanakan setelah implementasi berakhir. Implementasi kebijakan dapat dilakukan pada waktu pelaksanaan. Implementasi kebijakan ini dievaluasi pada tahap perencanaan. Hal yang sama juga kita tanyakan pada narasumber ke-2 dan narasumber ke-3.

Perencanaan yang kurang baik saat memulai implementasi kebijakan ini. Makanya kita bisa kekurangan anggaran serta SDM ketika pelaksanaannya. Ini memang hal yang harus lebih kita perhatikan dengan amat detail untuk program-program selanjutnya.

Saya sudah sangat senang dengan hasil implementasi tahap ini tapi saya tetap berharap agar implementasinya dilakukan dengan cepat agar semakin mudah berurusan.

Agar memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini dengan sebaik mungkin. Supaya masyarakat tidak perlu terlalu lama menunggu manfaatnya.

3. Pembahasan Temuan

Iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan pada 7 September 2022, 62,1 % populasi di Indonesia telah mengakses internet di tahun 2021. Selain itu, menurut laporan Profil Internet Indonesia 2022 yang dirilis oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia di 2022 mencapai angka 210 juta orang atau sebesar 77,02 % dari penduduk Indonesia.

Peningkatan pengguna internet ini tentu didukung dengan infrastruktur yang semakin membaik, hal ini juga dibuktikan dengan laporan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI), hingga semester pertama 2022, BAKTI telah membangun *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di 3.816 titik. Rinciannya, sebanyak 1.682 titik merupakan BTS *existing* yang dibangun sejak 2015-2022 dan 2.134 lainnya adalah BTS di lokasi baru. 4 diantaranya berada di kabupaten Gayo Lues.



BTS
Padang Terangun



BTS
Pantan Cuaca



BTS combat
Pining



BTS
Combat Pining

Akselerasi transformasi digital di Indonesia yang meliputi percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, dan penyiapan peta jalan (*roadmap*) transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi Pusat Data Nasional serta penyiapan regulasi, skema-skema pendanaan transformasi digital, dan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia sebagai talenta digital adalah arahan Presiden Joko Widodo terkait akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Namun adakalanya terjadi '*digital divide*', yaitu keberadaan teknologi komputer, jaringan internet, dan pelayanan telepon yang baik, cepat dan murah tidak bisa diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Mereka yang berada di perkotaan saja yang memiliki kondisi infrastruktur internet dan layanan telepon yang lebih baik sedangkan masyarakat di daerah pedesaan belum bisa mendapatkan komputer yang bagus, jaringan internet cepat dan layanan telepon yang baik.

Hal ini juga terjadi di Gayo Lues. Dengan segala dukungan yang ada, hingga saat ini Daerah Kabupaten Gayo Lues masih memiliki 77 wilayah *blankspot*. Bupati

Gayo Lues melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Gayo Lues menyatakan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jaringan serta interkoneksi bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues (SKPK) yang menghasilkan kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintah Gayo Lues untuk diimplementasikan.

Sebuah negara harus melakukan proses pembangunan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang bersifat terikat dan memaksa. Kebijakan publik merupakan basis keunggulan bangsa walaupun Kebijakan publik adalah realitas yang sangat rumit, karena berisi segala bentuk keputusan pemerintah yang sifatnya mengikat dan keputusan-keputusan tersebut diharapkan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan.

Tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan (Edwards III, 1984). Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan

yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat (Imronah, 2021).

Gow dan Morss (dalam Pasolong, 2013) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan, pertama adalah hambatan politik. Hambatan politik bisa saja terjadi ketika ada berbagai “kepentingan” para aktor didalamnya sehingga menjadikan kebijakan yang telah terencana menjadi tidak tepat sasaran.

Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Namun, percampuran berbagai sistem nilai dalam perumusan kebijakan tidak bisa dihindari karena perumus kebijakan sebagai manusia tidak mungkin bisa menghindar dari kepentingan pribadi, kelompok, ideologi, dan sebagainya. Di samping itu, dalam proses kebijakan persinggungan berbagai nilai adalah hal yang wajar. Bahkan walaupun disadari bahwa perumus kebijakan yang semula berangkat dari dan didominasi oleh sistem nilai tertentu katakanlah misalnya nilai partai politik mereka tetap berusaha dan berjuang agar nilai tersebut bisa diterima oleh pihak lain sebagai nilai bersama (*shared values*) atau nilai yang diperjuangkannya tidak berseberangan dengan nilai kebijakan yang diinginkan dan diterima oleh semua (Islamy, 2016).

Mengubah program-program menjadi praktek adalah tidak sesederhana sebagaimana tampaknya. Hal ini karena berbagai alasan yang berkaitan dengan sifat dari permasalahan, situasi sekelilingnya, atau organisasi sebagai mesin administratif yang bertugas melaksanakannya, maka program-program mungkin tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan. Ini adalah merupakan

realita dalam implementasi, yang menyimpang dari tujuan-tujuan yang ditetapkan dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hal ini sangat penting bagi kita untuk menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan, dan mendorong kepada kita agar dapat memahami mengenai bagaimana proses kebijakan publik. (Tachjan, 2006).

Implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan publik, atau antara visi dengan realitas. Hampir selalu terjadi distorsi antara hal-hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai atau terealisasikan. Banyak faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut, misalnya sumber dana minimal yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia, sementara pelaksanaan kebijakan publik itu tidak bisa ditunda.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik memerlukan pendekatan top-down dan bottom-up sekaligus. Pendekatan top-down terutama berfokus pada ketersediaan unit pelaksana (birokrasi); standar pelaksanaan; kewenangan; koordinasi; dll. Pendekatan bottom-up menekankan pada strategi-strategi yang digunakan oleh pelaksana saat menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik sebagai dasar untuk memahami kebijakan publik itu secara keseluruhan. Implementasi Kebijakan Publik Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat tergantung pada keberhasilan mengidentifikasi jejaring kerjasama antar aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik itu, karena pada akhirnya aktor itulah yang akan melaksanakan apapun kebijakan publik yang dibuat. Karena itu, sejak tahapan formulasi kebijakan publik sudah harus diketahui

secara pasti siapa yang berkepentingan; bagaimana interaksi antar aktor terbentuk; serta strategi yang digunakan untuk mencapai kepentingan itu.

Sebagai jembatan untuk menghubungkan pendekatan top-down dan bottom-up inilah, Sabatier (1993) mengungkapkan pentingnya dilakukan advokasi kebijakan publik tidak hanya pada level formulasi tapi juga implementasi dan bahkan evaluasi kebijakan publik. Advokasi kebijakan publik menyangkut ekspresi keberpihakan seseorang pada nilai-nilai tertentu. Penggunaan advokasi kebijakan publik dalam implementasi kebijakan publik dimaksudkan untuk mengubah kondisi yang dikehendaki dengan cara memastikan penentu kebijakan publik berada di pihak yang melakukan advokasi, sehingga aspirasi masyarakat semaksimal mungkin terakomodasi. Dimensi lain yang seringkali terlupakan dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah nilai-nilai kepercayaan (trust) dan tanggung jawab (responsibility).

Kepercayaan menjadi penting untuk membangun penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan publik, sehingga masyarakat mau mendukung pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Sementara itu, tanggung jawab merupakan jaminan bagi konsistensi pelaksanaan kebijakan publik. Kepercayaan merupakan modal utama yang sangat penting, tapi tidak mengabaikan unsur tanggung jawab dalam implementasi kebijakan publik. Implementasi merupakan perpaduan antara tanggungjawab dan kepercayaan untuk merealisasikan visi yang terkandung dalam kebijakan publik. Kedua dimensi ini seringkali terabaikan dalam melaksanakan suatu kebijakan publik, sehingga alih-alih menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, kebijakan publik justru menjadi pemicu masalah dan sumber konflik baru.

Dengan menempatkan implementasi kebijakan publik sebagai proses politik yang akuntabel, konsisten, bertanggungjawab, dan terbuka, maka diharapkan distorsi yang mungkin terjadi dapat diminimalkan dan realisasi visi yang terkandung dalam materi kebijakan publik dapat dimaksimalkan.

Dalam implementasinya sangat jarang ada kebijakan yang tergolong gagal total dalam arti sama sekali tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi dengan arah yang jauh menyimpang dari tujuannya. Hal demikian sangat terkait dengan mekanisme dan kontrol yang cukup ketat yang diberlakukan di organisasi publik. Kontrol itu dimulai sejak tahap perumusan dan perencanaan kebijakan sebelum kebijakan tersebut benar benar dilaksanakan.

Meskipun demikian tetap saja ada kemungkinan untuk gagal total, terutama jika berkaitan dengan hasil dan manfaat yang diharapkan bisa diciptakan. Maksudnya ada banyak kebijakan yang tergolong berhasil dilaksanakan sebagaimana SOP, tetapi tidak semua keberhasilan itu berbuah pada hasil dan manfaat yang diharapkan tepat menysasar target kebijakan.

Berdasarkan temuan di lapangan, Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues berhasil diimplementasikan. Baik pemerintah dan masyarakat telah merasakan manfaat dari implementasi ini. Selain itu, pelayanan yang efektif dan efisien adalah salah satu perwujudan dari terlaksananya fungsi pemerintah daerah hal ini juga sejalan dengan Tanjung dan Hajar (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimal mewujudkan tugas dan fungsi pemerintahan.

Meskipun demikian, dalam implementasi kebijakan, perlu memperhatikan

sistem pengimplementasian dari awal implementasi kebijakan hingga implementasi kebijakan ini berakhir. Hal ini juga sejalan dengan Usman (2020) bahwa kinerja dalam sistem pelaksanaan dapat dilihat dengan bagaimana pekerjaan dilakukan dan bagaimana penampilan pada saat pekerjaan dilakukan sampai pekerjaan selesai dikerjakan menyatakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Dari segi perpeskitif proses, implementasi kebijakan ini telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang telah disepakati sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber 1 dan hal ini juga sejalan Wahab (2001) yang menyatakan dengan kebijakan Publik, paling tidak dalam bentuk positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (community as as whole) dan memiliki daya pakasa tertentu yang tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.

Dari perspektif hasil, implementasi kebijakan ini telah membawa perubahan dimana baik masyarakat dan pemerintah kini lebih efektif dan efisien dalam berkegiatan yang membutuhkan internet hal ini sejalan dengan Akib (2010) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Hal ini juga sejalan dengan Jumroh (2021) yang menyatakan organisasi modern seperti pemerintahan daerah, bisa dinyatakan bahwa hampir semua kebijakan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik adalah sudah dilaksanakan, dalam arti sudah didukung oleh aturan mainnya, tersedia anggarannya, serta ada sumber daya dan peralatan yang mendukungnya, sehingga tinggal dilaksanakan saja. Adalah soal lain ketika sudah dilaksanakan tetapi kinerjanya dianggap masih rendah. Misalnya serapan anggarannya yang rendah, tidak tepat waktu, mutu atau kualitas produknya yang rendah dan sebagainya. Jika demikian kondisinya, maka kinerja pelayanan tersebut dinyatakan rendah atau tidak berkualitas. Sebaliknya jika sudah dilaksanakan sebagaimana SOP dan dianggap efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya dan tepat waktu, maka pelaksanaan program dan kegiatan publik tersebut sering dianggap berhasil.

Namun, Diskominfo saat ini sedang menghadapi tantangan kurangnya anggaran serta SDM. Menurut Edward III (1984) salah satu syarat utama keberhasilan proses implementasi adalah sumber daya yang meliputi staf yang cukup jumlah dan mutunya hal ini juga sejalan dengan Mukhsin (2020) yang menyatakan bahwa jika teknologi tercanggih sekalipun tapi tidak ada yang mengoperasikannya, maka sistem tidak akan berjalan dengan maksimal. Perpaduan

teknologi dan manusia pengelola merupakan kunci suksesnya penerapan.

Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting karena sumber daya yang lainnya dapat diadakan sesuai dengan kemampuan dimilikinya. Namun, sumber daya manusia pengadaannya melalui proses yang kompleks ketimbang yang lainnya. Dalam manajemen sumber daya manusia, pengadaannya melalui domain kebijakan sumber daya manusia (Bernardin & Russel, 1993: 12), meliputi:

- 1) Organizational design;
- 2) Staffing;
- 3) Reward systems, benefits, and compliance;
- 4) Performance management;
- 5) Employee and organizational development; and
- 6) Communication and public relation.

Hal ini menunjukkan kompleksnya aktivitas manajemen sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi, agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Peranan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor utama yang penting dalam suatu organisasi ataupun program yang dilaksanakan termasuk dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini juga sesuai dengan Nasution (2017) yang menyatakan bahwa peranan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang penting

dalam organisasi.

Nirwandar (1999; 2) dalam Waluyo mengemukakan bahwa dalam pembentukan organisasi Daerah perlu mengukur kemampuan pembiayaan dana kemanfaatannya bagi pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Kurangnya anggaran juga masih menjadi hambatan bagi Diskominfo Gayo Lues dan hal ini jelas bertentangan dengan Grindle (1980: 7) yang menyatakan Proses implementasi baru akan dimulai apabila dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Hal ini dapat terjadi karena banyak hal. Diantaranya adalah karena anggaran yang diterima memang kecil atau ada perubahan saat perencanaan. Pada saat perencanaan, besaran anggaran masih sangat indikatif maka sering disebut sebagai pagu indikatif. Pada posisi pagu indikatif itulah jumlah yang akan disasar sangatlah terbatas dan selektif karena proses teknokratis menuntut seperti itu. Namun pada proses berikutnya yaitu penganggaran (KUA PPAS dan APBD) selalu terjadi perubahan kemampuan keuangan daerah (kepastian DAU, DAK dan Dana Perimbangan lainnya), sehingga menimbulkan perubahan pagu indikatif menjadi plafon anggaran dan selanjutnya menjadi definitif anggaran (DPA). Perubahan rupiah tentunya memicu perubahan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Santoso, 2016).

BAB V PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues adalah sebagai berikut:

1. kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues telah diimplementasikan.
2. Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues masih menghadapi hambatan yang berasal dari kurangnya anggaran dan SDM.
3. Dengan keterbatasan SDM dan anggaran yang ada saat ini, Diskominfo berusaha mencapai target pembagunan infrastruktur sebanyak 80% pada tahun 2023.
4. Masyarakat serta pemerintah Gayo Lues telah merasakan hasil dari Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues meskipun implementasi belum rampung.
5. Efektifitas dan efisiensi yang diharapkan dari Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues meningkat semenjak kebijakan ini implentasikan.
6. Pada era modern ini, masih ada daerah-daerah yang belum memiliki internet yang berkualitas bagus.

2. Saran

1. Agar Diskominfo Gayo Lues lebih kreatif dalam menemukan solusi dari hambatan yang dihadapinya terutama terkait SDM. Saat ini sudah tersedia banyak sarana pembelajaran. *Short course* dapat menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan SDM karena saat ini banyak *short course* yang gratis.
2. Agar Diskominfo Gayo Lues ebih teliti dalam pembuatan rencana anggaran agar tidak terjadi kurang anggaran pada tahun selanjutnya.
3. Perencanaan yang baik sebelum implementasi terkait SDM yang dibutuhkan.
4. Agar masyarakat berpartisipasi mendukung implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues dengan melaporkan langsung kendala internet yang mereka hadapi.
5. Agar setiap individu meningkatkan kualitas skillnya pada pekerjaan yang dia lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin.Tahir.2014.Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Bandung : Alvabeta*
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa , dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, Volume 1 No. 1*
- Irwan Syari Tanjung, S. H. (2015). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Model Total Quality Service (Tqs) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Hampan Perak.*
- hajar, S. (2015). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Model Total Quality Service (Tqs) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Hampan Perak.*
- Islamy, M. I. (2016). Kebijakan Publik. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.*
- Manullang, M. (2001).Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Bpfe.*
- Nasution, N. (2021). Digital transformation to the sustainability of public relations profession in the era of disruption. Commicast, 52-57.*
- Budiharto,Widodo.2014.Teori dan Implementasi. Edisi Revisi.Yogyakarta : Penerbit Andi Siagian, P. S. (2013). Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima). Rineka Cipta.*
- Imronah. (2021). Implementasi Kebijakan Perspektif Model.*
- Mukhsin. (2010). Peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. Teknokom, Vol 3*

No 1.

Mulyadi.(2015). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba Empat.

Narbuko, C. (2016). Metodologi Penelitian. Bumi Aksara.

Tahir, A. (2016). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alfabeta.

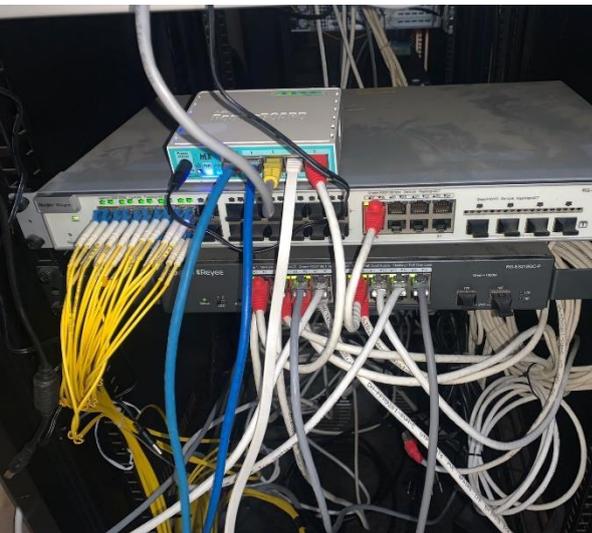
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Dokumentasi dengan Narasumber



Base Transceiver Station (BTS)



Switch



Modem Indihome



Server

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulana Surya Zikri
 Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 15 Juni 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama/bangsa : Islam/Indonesia
 Alamat : Batin Wih Pongas Kec.Bukit
 Anak ke : 1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara
 Nama Orang Tua
 Ayah : Mahdli Arami,S.K.M
 Ibu : Nova Khairani,S.K.M
 Alamat : Batin Wih Pongas Kec.Bener Meriah
 Riwayat Pendidikan :

1. Tamat SD Negeri 1 Blangkejeren Tahun 2013, berijazah;
2. Tamat Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Tahun 2016, berijazah;
3. Tamat Madrasah ‘Aliyah di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Tahun 2019, berijazah;
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Admnistrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya

Penulis

Maulana Surya Zikri

Acc. 1/10/2014. M.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Saiful Idris Wintareza, SE, MM

Usia : 40

Jabatan : Kepala Diskominfo, Persandian dan Statistika Gayo Lues

1. Adanya kepentingan yang di pengaruhi oleh kebijakan

- a. Bagaimana pengaruh kepentingan pada proses pembuatan dan implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues?
- b. Apa saja kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues?
- c. Bagaimana cara Diskominfo Gayo Lues mengidentifikasi kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut?

2. Adanya jenis manfaat yang akan dihasilkan

- a. Apa saja manfaat yang dihasilkan dari implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues?
- b. Bagaimana cara Diskominfo Gayo Lues mengukur dan menilai manfaat-manfaat tersebut?
- c. Bagaimana manfaat-manfaat tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi lingkungan pemerintahan Gayo Lues?

3. Adanya derajat perubahan yang diinginkan

- a. Bagaimana upaya-upaya yang bapak lakukan untuk mencapai derajat perubahan yang di inginkan dalam hal pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintah Gayo Lues?
- b. Seberapa besar derajat perubahan yang diinginkan oleh pemerintah daerah Gayo Lues terhadap pengelolaan dan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan setempat?
- c. Apa yang menjadi hambatan Diskominfo Gayo Lues sehingga derajat perubahan pada kebijakan yang diinginkan tidak tercapai dalam waktu yang sudah ditentukan?

4. Adanya sumber daya yang dikerahkan

- a. Bagaimana Diskominfo mendistribusikan sumber daya yang dikelola secara efektif dan efisien pada pengelolaan percepatan penggunaan internet di pemerintahan Gayo Lues?
- b. Bagaimana upaya Diskominfo Gayo Lues dalam mengatasi kendala dalam penggunaan sumber daya yang ada pada pengelolaan dan percepatan penggunaan internet?
- c. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan sumber daya dalam implementasi kebijakan tersebut?



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Bisa merubah nasib dan juga kehidupan
melalui pendidikan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akre/PT/002019
Pusat Administrasi: Jalan Makmur Basi No. 1 Medan 22208 Telp. (061) 6622480 - 6622487 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@https://isip.umsu.ac.id * Esip@umsu.ac.id #umsumedan @umsumedan #umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 13 Februari 2023

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Maulana Sungs Zuri
N.P.M : 19021000030
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan siks : 195.0 siks, IP Kumulatif 3,30

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi kebijakan publik dalam mendorong percepatan pembangunan pengguna internet di kabupaten Goyo Lues	4/0 2023
2	Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di kabupaten Goyo Lues.	
3	Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan internet penggunaan internet di pemerintahan Goyo Lues.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tardu bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

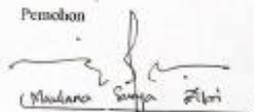
Medan, tgl. 13 Februari 2023

Ketua,

(Maulana Sungs Zuri, S.Es, M.Si.)
NIDN. 0122118301

PA. AFFAN AL QUDUS

(031)

Pemohon

(Maulana Sungs Zuri)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

(Affan Al-Qudus, S.Sos., MS)
NIDN:



MAGELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAH-PT/Wakil/PT/2020
 Pusat Administrasi: Jalan Mahbar Elan No. 1 Medan 20218 Telp. (061) 6621409 - 6621407 Fax. (061) 6621474 - 6621491
<http://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id [f](#) [u](#) [t](#) [v](#) [w](#) [x](#) [y](#) [z](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
 Nomor : 325/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 14 Februari 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : MAULANA SURYA ZIKRI
 N P M : 1903100039
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERCEPATAN PENGGUNAAN INTERNET DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO LUES

Pembimbing : AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana terutang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 031.19.310 tahun 2023
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 14 Februari 2024.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 07 Sya'ban 1444 H
 28 Februari 2023 M



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan,
2. Pembimbing ybs di Medan,
3. Peringgal

Dekan,

Dr. ARIEN SAJEJIL, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0130017402





UMSU
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Khatun Ruchayati No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 8233907 - (061) 8610458 Ext. 389-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 09 Maret 2023
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu alaikum wa, w.b.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Maulana Rimpus Rizki
 N P M : 19021000529
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 327 /SK/IL3/UMSU-05/F/2023, tanggal 09 Februari 2023, dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencapaian Pengawasan Internet di Lingkungan Pemerintahan Gaya Liris

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam

Menyetujui,
 Pembimbing

[Signature of Pembimbing]

Pemohon,

[Signature of Pemohon]
 (Maulana Rimpus Rizki)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



LINDANGPANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 477/UND/13.AJUNSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023
Waktu : 08.00 WIB and Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	KOROS POKOS MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMBERING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	MARLEVA SYRYA JUSRI	193100038	RAFEHAHILAR RICKY S.Sos., M.A.	AFFAN AL-ODDUS S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOMAN PERKOTAAN PENGOLAHAN INTERIET DI LINGKUNGAN PERKOTAAN GAYO LUES
17	YOLANDA FEBRIANI	193100014	AGUNG SUPUTRA, S.Sos., M.AP	RYAFUDDIK, S.Sos., M.K	FUNGSI KORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA TOLAM KECAMATAN GUNUNG MERUHIKIMAB PAKTEN ACEH SINGKAL
18	MALITA ANGGIRANI	193100047	AGUNG SUPUTRA, S.Sos., M.AP	RAFEHAHILAR RICKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKARAN TEMPAT BERJALAN DI PASAR PESISIR KOTA MEDAN
19	SUCI RAHMADANI	193100003	AGUNG SUPUTRA, S.Sos., M.AP	Dr. SITI HARIR, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS KEMERIA APARATUR DESA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT DI DESA PASAR BATAHAN KABUPATEN MANGKALING WITAL
20	PUTRI DEASTUTI SREOGAK	193100056	AFFAN AL-ODDUS S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA S.Sos., MSP.	FUNGSI DIRECTING KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR KEPALA DESA RINCITAN KABUPATEN TERANU SELATAN

Medan, 22 Swatan, 14611
15 Maret 2023 M





UMSU
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/DK/BAN-PT/AK-KPP/10X/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Makmur Buri No. 3 Medan 20238. Telp. (061) 9522668 - 9522452 Fax. (061) 9525474 - 9511993
 @himpay-umsu.ac.id | fsc@umsu.ac.id | @umsu.ac.id | @umsu.ac.id | @umsu.ac.id | @umsu.ac.id

Nomor : 621/KET/IL3.AU/UMSU-03/P/2023
 Lampiran : --
 Hal : **Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 20 Ramadhan 1444 H
 11 April 2023 M

Kepada Yth : Kepala Diskominfo Gayo Lues
 di-

Tempat,

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu 'alaikum Wt Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **MAULANA SURYA ZIKRI**
 N P M : 1903100039
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERCEPATAN PENGGUNAAN INTERNET DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO LUES**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wasalamu 'alaikum wr. wb

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan-I



Dr. ARRAB ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.
 NIDN. 0111117804



Cc: File.





**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN**

Jln. Machmoed, No.1 Telp. (0642) Blangkejeren-24653
Email : diskominfo.gayolues@gmail.com Website : diskominfo.gayolueskab.go.id

Blangkejeren, 03 Mei 2023

Nomor : 255/31/2023
Lampiran : 1(satu)
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth:
**Dekan-I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatra Utara.**
di-
Tempat

- Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Penelitian No: 621/KET/II-3.AU/UMSU-03/F/2023 yang diperuntukan kepada :

Nama : MAULANA SURYA ZIKRI
NIM : 190100039
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik

- Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan kegiatan Penelitian, di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Gayo Lues, Untuk menyelesaikan Skripsi (Tugas Akhir).
- Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GAYO LUES
a/n Sekretaris


MARHABAN, ST
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760410 200604 1 015

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Gayo Lues;
- Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
- Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
- Pertinggal.



MAJELIS POKOK KAWASAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN PBI/PW/PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Perpustakaan & Lembaga Layanan Perpustakaan Regional Sumatera, Indonesia No. 467791.1.P.0113.2012
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mochtar Husei No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 66224567
 Fax. (061) 66224567 @ <http://perpustakaanumsu.ac.id> * perpustakaan@umsu.ac.id @ perpustakaan.umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 802 / KET/BJ-AU /UMSU-PPM/2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Maulana Surya Zohri
 NIM : 190310039
 Univ./Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan/P.Studi : Ilmu Administrasi Bisnis

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 30 Syawal 1444 H
 20 Mei 2023 M

